



LAPORAN PROYEK PERUBAHAN

Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Dengan Kolaborasi Kearifan Lokal Di Kabupaten Teluk Wondama (APIK)

DISUSUN OLEH:

SAID KARIM

NDH: 42

PEMDA KABUPATEN TELUK WONDAMA PAPUA BARAT

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN X
BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN
(BBPMKP)**

**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA BEKERJA SAMA
DENGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN)**

TAHUN 2024

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN
NASIONAL TINGKAT II**

Judul : Akselerasi Pembangunan Infrastruktur dengan Kolaborasi
Kearifan Lokasi Di Kabupaten Teluk Wondama
Nama : Said Karim, ST, M.Si
NIP : 1978052805781005
Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten
Teluk Wondama Provinsi Papua Barat

Telah diseminarkan di depan Penguji pada hari Rabu Tanggal 11 September 2024

Mentor,

Coach,

Aser Waroy, S.Sos

NIP 196704241997031007

Dr. Baban Sobandi, SE., M.Si.

NIP 196705011993031001

Penguji,

Kuntoro Boga Andy, PhD

NIP 197412011999031002

LEMBAR PERNYATAAN KOMITMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Said Karim, ST.MSi
NDH 42
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Unit Kerja : Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama

Dengan ini menyatakan komitmen untuk melaksanakan target jangka menengah dan jangka panjang dari proyek perubahan yang telah disusun dalam rencana proyek perubahan yang berjudul “Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Dengan Kolaborasi Kearifan Lokal” di Wilayah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat.

Demikian komitmen ini saya buat sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rasiei, 10 September 2024

Mengetahui
Atasan Langsung,

Yang Menyatakan

Aser Waroy, S.Sos
NIP. 197403082002121006

Said Karim, ST. MSi
NIP. 197805282003121005

ABSTRAK

Pembangunan Infrastruktur di daerah sering kali mengalami hambatan non teknis di lapangan seperti gerakan penolakan masyarakat adat pemilik hak ulayat atas proyek pembangunan infrastruktur yang berada di lokasi tanah adat menyebabkan lambatnya perkembangan dan pertumbuhan sebuah daerah, lebih khusus di daerah Papua yang masalahnya makin kompleks karena berkaitan dengan adat istiadat daerah setempat. Lemahnya aspek pengelolaan kolaborasi kearifan lokal daerah setempat untuk bersinergi dalam pembangunan infrastruktur di Bidang Pekerjaan Umum menjadi tantangan dalam akselerasi pembangunan infrastruktur di sektor Pekerjaan Umum.

Proyek perubahan “Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Dengan Kolaborasi Kearifan” sebagai upaya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat melalui kerjasama berbagai stakeholder untuk mengembangkan inovasi baru yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pemilik hak ulayat tanah adat.

Proyek perubahan ini diharapkan mempercepat pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan menjadi sesuatu yang bisa di andalkan untuk kemajuan dan pertumbuhan daerah, membuka aksesibilitas, menurunkan resistensi masyarakat dengan gerakan penolakan pembangunan infrastruktur serta menghilangkan mindset masyarakat tentang proyek di tanah adat mereka sebagai sumber mencari keuangan pribadi tanpa memikirkan resiko.

Rencana milestones jangka pendek proyek perubahan ini berfokus pada tersusunnya kesamaan persepsi antar stakeholder, pembentukan tim kerja efektif dan terbentuknya kerjasama dengan *stakeholder* dan komitmen bersama akselerasi pembangunan infrastruktur. Rencana milestones jangka menengah adalah terlaksananya penandatanganan pakta integritas dan penerapan SOP kearifan lokal pada proyek yang skala besar. Selanjutnya rencana jangka panjang, milestones difokuskan pada terlaksananya penandatanganan pakta integritas pada proyek pembangunan infrastruktur yang lebih luas dari jangka menengah, penerapan SOP kearifan lokal yang lebih besar dari jangka menengah.

Sebagai capaian dari strategi pemasaran sektor publik yang dilakukan selama pelaksanaan jangka pendek, seluruh milestones jangka pendek dapat dicapai dengan baik. Kunci keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan ini antara lain penerapan konsep *system thinking*, dialog strategis, komunikasi yang efektif dan kerjasama baik internal dalam tim efektif maupun dengan *stakeholder* terkait.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang memberikan hikmah, Rahmat dan Karunianya sehingga penyusunan Laporan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II tahun 2024 dengan judul “ Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Dengan Kolaborasi Kearifan Lokal (APIK) “ dapat diselesaikan.

Laporan proyek perubahan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN II) tahun 2024 dengan tujuan Terwujudnya akselerasi pembangunan infrastruktur dengan kolaborasi Kearifan Lokal dan memaparkan capaian outcome dari implementasi proyek perubahan yaitu: (1) Meningkatkan pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur; (2) Memajukan kerja sama antar sesama stakeholder; (3) Meningkatkan rekognisi kepakaran dan kolaborasi dan (4) Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman kolaborasi kearifan lokal dalam pembangunan infrastruktur di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Teluk Wondama. Dalam penyusunan proyek perubahan ini kami telah mendapatkan bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Sekretaris Daerah, Aser Waroy, S.Sos, selaku Mentor yang telah membimbing dan mengarahkan dalam menyusun Laporan Implementasi ProyekPerubahan;
2. Bapak Dr. Baban Sobandi, SE., M.Si, selaku Coach yang telah memberikan bimbingan dan arahan terhadap penyelesaian Laporan Implementasi Proyek Perubahan;
3. Segenap Widyaiswara yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan;
4. Keluarga Besar Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya Tim Efektif Proyek Perubahan yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyusun Laporan Implementasi Proyek Perubahan;
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Implementasi Proyek Perubahan ini hingga selesai.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih sangat banyak kekuarangan, sehingga saran dan masukan kami harapkan demi kesempurnaan laporan proyek perubahan sehingga bermanfaat bagi penyelenggara pembangunan infrastruktur khususnya di Bidang Pekerjaan Umum.

Rasiei, 6 September 2024
Hormat Kami

Said Karim
NDH. 42

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	5
LEMBARAN PERNYATAAN KOMITMEN	. ii
ABSTRAK	6
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I RENCANA PROYEK PERUBAHAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
1.3 RUANG LINGKUP	2
1.4 MANFAAT	2
1.5 OUTCAME	2
1.6 KONDISI SAAT INI.....	2
1.7 KONDISI YANG DI HARAPKAN.....	3
BAB II TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN	4
2.1 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS.....	4
2.2 MILESTONE (JANGKA PENDEK, MENENGAH, DAN PANJANG)	4
2.3 ANALISIS SWOT.....	7
BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN	8
3.1 TARGET CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN	8
3.2 GAMBARAN PELAKSANAAN MILESTONE JANGKA PENDEK.....	10
3.3 GAMBARAN PELAKSANAAN MILESTONE JANGKA MENENGAH (YANG DI PERCEPATAN).....	12
3.4 PERNYATAAN DUKUNGAN STAKE HOLDER.....	18
3.5 TESTIMONI PENERIMA BANTUAN LANGSUNG.....	21
BAB IV MARKETING SEKTOR PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI	23
4.1 PEMETAAN STAKEHOLDERS DAN PENGARUHNYA	23
4.2 STRATEGI MARKETING	26

4.3	STRATEGI MENGATASI KENDALA.....	27
4.4	PERAN <i>PROJECT LEADER</i> DALAM MARKETING SEKTOR PUBLIK	27
4.5	SOLUSI	28
4.6	STRATEGI PENGEMBANGAN SDM.....	29
BAB V PENUTUP		30
DAFTAR LAMPIRAN		33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Milestone jangka pendek dari Juli sampai dengan September 2024	4
Tabel 2. Milestone jangka menengah dari Januari 2025 s/d Juni 2025	5
Tabel 3. Milestone jangka panjang dari Januari 2026 sampai dengan Juli 2026.....	6
Tabel 4. Target Capaian Proyek Perubahan pada Milestone Jangka Pendek dari Agustus sampai dengan September 2024	8
Tabel 5. Target Capaian Proyek Perubahan pada Milestone Jangka Menengah	10
Tabel 6. Milestone Pertama	10
Tabel 7. Milestone Kedua.....	11
Tabel 8. Milestone Ketiga.....	11
Tabel 9. Milestone Keempat.....	12
Tabel 10. Milestone Percepatan Jangka Menengah.....	12
Tabel 11. Kegiatan peran project leader dalam percepatan pencapaian milestone secara kronologi dalam jangka pendek.....	14
Tabel 12. Strategi Manajemen Sektor Publik.....	
Tabel 13. Strategi Komunikasi	26
Tabel 14. Kegiatan Pengembangan SDM.....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. DADIM 1811 Letkol Budi Setiadi SIP	18
Gambar 2. KAPOLRES AKBP Hari Susanto.....	18
Gambar 3. KAPOLSEK AIPTU. M.S. Atmaja, SH	18
Gambar 4. Kepala Dinas Sosial. Musa Sapari, S.Sos.....	19
Gambar 5. Kepala Distrik Wasior. M. Iqbal Marani, SIP	19
Gambar 6. Kepala Kampung Moru. Piter Imburi.....	19
Gambar 7. Adrian Worengga. Ketua Dewan Adat.....	20
Gambar 8. Daud Suabey salah satu pemilik Hak ulayat di Teluk Wondama	20
Gambar 9. Remran Sinadia, SE. Ketua Komisi C. DPRK Teluk Wondama	20
Gambar 10. Mama-mama Penerima Bantuan Sembako I (Mama Mince)	21
Gambar 11. Mama-mama Penerima Bantuan Sembako II (Mama Ani)	22
Gambar 12. Peran Stakeholder sebelum implementasi PP	25

BAB I

RENCANA PROYEK PERUBAHAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Pekerjaan Umum sebagai Organisasi Perangkat Daerah teknis yang melaksanakan urusan pekerjaan di bidang umum yang meliputi pembangunan infrastruktur bidang Binamarga, Perumahan, Cipta karya dan Pengairan dengan kekuatan sumber daya manusia yang terbatas. Sering kali pembangunan di sektor pekerjaan umum mengalami kendala non teknis di lapangan seperti pemalangan atau penolakan masyarakat pemilik hak ulayat atas proyek pembangunan infrastruktur yang berada di lokasi tanah adat.

Penyedia (pihak ketiga) sebagai pemenang tender mengalami kesulitan proses pembangunan setelah mereka ditetapkan sebagai pemenang tender dan akan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam melakukan proses negosiasi dan harus mengeluarkan biaya yang tidak terduga hingga jumlah juga cukup besar. Oleh karena itu perlu dilakukan penyelesaian pembangunan tersebut sebagai akselerasi pembangunan infrastruktur dengan kolaborasi kearifan lokal sehingga masyarakat bisa menikmati kehadiran pembangunan di tengah mereka dan meminimalisir upaya penolakan dan penghalang pembangunan tersebut.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari rancangan proyek perubahan tentang akselerasi pembangunan infrastruktur dengan kolaborasi kearifan lokal di Kabupaten Teluk Wondama adalah merumuskan dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pemalangan atau penghambat pembangunan infrastruktur di bidang pekerjaan umum dengan tujuan sebagai berikut :

1. Jangka Pendek

Terwujudnya akselerasi pembangunan infrastruktur dengan kolaborasi Kearifan Lokal

2. Jangka Menengah :

Merubah *mindset* dan *resistensi* masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum

3. Jangka Panjang :

Terealisasinya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat karena infrastruktur di sektor Pekerjaan Umum dapat dibangun dengan penerimaan masyarakat adat

1.3 RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup dari proyek perubahan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penghambat pembangunan
2. Membentuk tim yang terlibat dalam kearifan lokal untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur
3. Merumuskan dan mensinkronisasi kolaborasi stakeholder internal dan eksternal untuk mendukung pembangunan infrastruktur

1.4 MANFAAT

Manfaat dari proyek perubahan ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perluasan pembangunan infrastruktur
2. Menekan laju kegagalan pembangunan
3. Menaikan pendapatan dan mensejahterakan masyarakat
4. Merubah mindset masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur

Sedangkan Outputnya adalah adanya SOP kolaborasi kearifan lokal antar stakeholder yang menjadi acuan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum

1.5 OUTCOME

Adapun outcome dari proyek perubahan ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur
2. Memajukan kerja sama antar sesama stakeholder
3. Meningkatkan rekognisi kepakaran dan kolaborasi

1.6 KONDISI SAAT INI

Adapun kondisi saat ini yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama adalah sebagai berikut :

1. Adanya lahan alam yang sangat luas belum terbangun infrastruktur pekerjaan umum di bidang cipta karya seperti perkantoran, taman (alun-alun), jaringan air bersih dan sanitasi, infrastruktur perumahan seperti perumahan layak huni, perumahan subsidi, dll, infrastruktur transportasi seperti pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan kampung yang masih terisolir
2. Adanya pemalangan Ruas Jalan Trans Papua di kampung Karuan-Sabubar-Ambuar-Yermatum

3. Adanya pemalangan jalan lingkungan di dalam perkampungan masyarakat di beberapa tempat di Wasior
4. Adanya pemalangan Pembangunan Talud dan drainase dalam kota Wasior maupun di Daerah Pesisir
5. Sering terjadi pemalangan bangunan Gedung dan perumahan baik di kota Wasior maupun di Pesisir Teluk

1.7 KONDISI YANG DI HARAPKAN

Adapun kondisi yang diharapkan setelah proyek perubahan ini dijalankan adalah sebagai berikut :

1. Melalui akselerasi dan kolaborasi kearifan lokal akan menjadi sarana stakeholder untuk tetap meningkatkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum
2. Menurunkan Resistensi Masyarakat dengan Gerakan pemalangan atau menghalangi pembangunan
3. Menghilangkan mindset masyarakat tentang proyek, sebagai sumber mencari keuangan pribadi tanpa memikirkan resiko
4. Memperluas areal pembangunan infrastruktur

BAB II

TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Manajemen pengelolaan proyek perubahan diperlukan untuk mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen proyek perubahan dengan seluruh pihak. Hal ini bertujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan proyek perubahan secara efektif. Perencanaan dan operasionalisasi proyek perubahan ini didukung tata Kelola organisasi Proyek Perubahan “Akselrasi Pembangunan Infrastruktur dengan Kolaborasi Kearifan Lokal”

MILESTONE (JANGKA PENDEK, MENENGAH, DAN PANJANG)

Untuk dapat mencapai keberhasilan dalam realisasi proyek perubahan ini, perlu disusun *milestone* yang mencakup tahapan mulai dari jangka pendek sampai jangka panjang sebagai berikut:

Tabel 1. Milestone jangka pendek dari Juli sampai dengan September 2024

No	Kegiatan	Jul 2024		Agst 2024				Sep 2024				Output
		M-3	M-4	M-1	M-2	M-3	M-4	M-1	M-2	M-3	M-4	
1.	Konsultasi dengan Sekda untuk menyampaikan permohonan kesedian menjadi mentor											SK Mentor
2.	Sharing dan Diskusi dengan Ketua Dewan Adat Papua Kab Teluk Wondama											Draf Juknis SOP Kearifan Lokal
3.	Melakukan FGD dengan Stakeholder Promotor											Draft Juknis SOP Kearifan Lokal
4.	Koordinasi dengan pihak stakeholder internal											Persamaan Persepsi Stakeholder
5.	Koordinasi dengan pihak stakeholder eksternal											Persamaan Persepsi Stakeholder
6.	Melakukan rapat dengan DAP, Kepala Distrik, Kepala Kampung, Kapolsek, Danramil											Terbentuknya Tim Kerja

7	Rapat persiapan dengan team efektif akselerasi kolaborasi kearifan lokal														Terbentuknya Tim Kerja
8	Penerbitan SK team kerja Akselerasi dan Kolaborasi kearifan lokal														SK Tim kerja
9	Penandatanganan Pakta integritas dan Komitmen Bersama Stakeholder untuk menyelesaikan pemalangan Pembangunan infrastruktur														Pakta Integritas Komitmen Bersama
10	Membuat uraian tugas kerja untuk pedoman pelaksanaan masing-masing anggota team														Juknis SOP kearifan lokal
11	Pembentukan SOP Kolaborasi Kearifan Lokal														SOP Kearifan Lokal

Keterangan: M-1 s/d M-4 sebagai minggu ke 1 sampai dengan minggu ke 4 setiap bulan

Tabel 2. Milestone jangka menengah dari Januari 2025 s/d Juni 2025

No	Kegiatan	Jan 2024				April 2024				Juni 2024						Output
		M-1	M-2	M-3	M-4	M-1	M-2	M-3	M-4	M-1	M-2	M-3	M-4	M-5	M-6	
1.	Rapat persiapan dengan team akselerasi dan kolaborasi kearifan lokal															Komitmen antar stakeholder
2.	Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen bersama team akselerasi dan kolaborasi yang lebih luas jangkauan kerjanya															Pakta Integritas Komitmen Bersama
3.	Implementasi Proyek Perubahan															APIK berjalan sesuai SOP

Keterangan: M-1 s/d M-4 sebagai minggu ke 1 sampai dengan minggu ke 4 setiap bulan

Tabel 3. Milestone jangka panjang dari Januari 2026 sampai dengan Juli 2026

No	Kegiatan	TAHUN							Output
		2026							
		B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	B-6	B-7	
1.	Rapat persiapan dengan team efektif sebelumnya								Penerapan APIK Dalam mega proyek
2.	Penandatanganan pakta interitas dan komitmen bersama team akselerasi dan kolaborasi yang lebih luas wilayahnya dari tujuan jangka menengah								Pakta Integritas Komitmen Bersama Mega proyek
3	Implementasi Proyek Perubahan								Penerapan APIK sesuai SOP

Keterangan: B-1 s/d B-12 sebagai bulan ke 1 sampai dengan bulan ke 12 dalam setahun

2.1 ANALISIS SWOT

Adapun alat yang digunakan dalam menganalisis masalah pemalangan dan penghambat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Teluk Wondama dengan menggunakan analisis SWAT, sehingga perlu dilakukannya pemetaan atau mapping persoalan yang menjadi penghalang pembangunan ini dengan terlebih dahulu menganalisis persoalan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT untuk mengidentifikasi permasalahan yang menjadi penolakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum adalah sebagai berikut:

A. Strengths (Kekuatan)

1. Mempunyai Kekuatan Hukum keberadaan organisasi
2. Adanya Dukungan Pemerintah Daerah
3. Adanya Dukungan Pendanaan yang cukup dari berbagai pihak

B. Weaknesses (Kelemahan)

1. Lemahnya SDM
2. Luasnya Wilayah Kerja
3. Belum terbentuk SOP team APIK

C. Opportunities (Peluang)

1. Lingkup kerja Provinsi dan Nasional
2. Anggaran infrastruktur yang dimiliki oleh semua instansi
3. Pemanfaatan hasil proyeknya dirasakan masyarakat

D. Threats (Ancaman)

1. Konflik kepentingan antar sesama anggota
2. Kehilangan toko masyarakat yang jadi panutan
3. Lemahnya koordinasi dan kerjasama antara stakeholder

Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas dapat diketahui faktor-faktor seperti ; kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan dihadapi dari masalah penolakan pembangunan jalan lingkungan. Untuk menyelesaikan permasalahan penolakan pembangunan jalan lingkungan oleh hak ulayat perlu dilakukan *mapping* dari berbagai pihak atau stakeholder. Harus ada kolaborasi antar stakeholder dengan kearifan lokal untuk memastikan pembangunan infrastruktur tidak mendapatkan penolakan dari hak ulayat sehingga dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan aman. Setiap stakeholder memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, namun saling terkait dalam proses pembangunan ini agar tidak ada hambatan di lapangan.

BAB III

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

3.1 TARGET CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN

Pelaksanaan proyek perubahan ini telah mencapai semua target milestone jangka pendek, bahkan ada beberapa milestone jangka menengah yang sudah tercapai dalam hal ini disebut sebagai percepatan pencapaian target milestone jangka menengah. Target capaian proyek perubahan pada milestone jangka pendek atau yang juga merupakan tahap persiapan proyek perubahan selama 60 hari pelaksanaan proyek ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Target Capaian Proyek Perubahan pada Milestone Jangka Pendek dari Agustus sampai dengan September 2024

KEGIATAN	RENCANA	REALISASI		PERAN	BUKTI LAMPIRAN
TAHAPAN I (Terwujudnya Persamaan Persepsi Stakeholder Internal)	Minggu ke-3 Juli 2024 sampai Minggu ke-4 Juli 2024	a. Konsultasi dengan sekretaris Daerah dan Minta Kesediaan Menjadi Menyetor	Juli 2024	Project Leader	Lembaran Penetapan Mentro dan Foto Dok
		b. Sharing dan Diskusi dengan Ketua Dewan Adat Papua	Juli 2024	Project Leader	Foto Pertemuan dengan Dewan Adat Papua
		c. Melakukan FGD dengan Stake holder Promotor	Juli 2024	Project Leader	Undangan dan Daftar Hadir
TAHAPAN II (Terwujudnya Persamaan Persepsi Stakeholder Eksternal)	Minggu ke-3 Juli 2024 sampai Minggu ke-4 Agustus 2024	a. koordinasi dengan pihak stakeholder eksternal	Juli 2024	Project Leader	Dokumentasi Pertemuan (foto)
		b. Koordinasi dengan pihak stakeholder Internal	Agust 2024	Project Leader	Dokumentasi Pertemuan (foto)

TAHAPAN III (Terbentuknya Team Akselerasi dan Kolaborasi)	Minggu ke-5 Agustus 2024 sampai Minggu ke-6 Agustus 2024	a. Melakukan Rapat dengan Lembar Adat, Keluarahan, Kepala Distrik, Kapolsek dan Koramil	Agust 2024	Project Leader	Undangan, daftar Hadir Kegiatan dan Dokumentasi (foto)
		b. Rapat persiapan dengan team efektif akselerasi	Agust 2024	Project Leader	Undangan, daftar Hadir Kegiatan dan Dokumentasi (foto)
		c. Penerbitan SK Team kerja Akselerasi dan kolaborasi kearifan lokasi	Agust 2024	Project Leader	Draf Salinan SK
TAHAPAN IV (Pembentuknya Antar Stakeholder)	Minggu ke-1 September 2024 sampai Minggu ke-2 September 2024	a. Penandata nganan Pakta Integritas Komitme n Bersama	5 Sep 2024	Project Leader	Undangan, daftar hadir dan Foto Dokumentasi Kegiatan
		b. Membuat uraian Tugas kerja sebagai pedoman pelaksana an kegiatan	6 Sep 2024	Project Leader	Draf Uraian Tugas

Kegiatan pada jangka menengah yang diselesaikan pada jangka pendek termasuk dalam percepatan capaian milestone ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Target Capaian Proyek Perubahan pada Milestone Jangka Menengah

KEGIATAN UTAMA	RENCANA	REALISASI		PERAN	BUKTI LAMPIRAN
1. Pembentukan Komitmen antar Stakeholder	Minggu ke-2 Januari 2025 sampai Minggu ke-4 April 2025	a. Penandatnganan Pakta Interitas Komitmen bersama	5 September 2024	Project Leader	SuratUndangan; Daftar hadir dan Foto Kegiatan
		b. Pembentukan SOP Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kolaborasi Kearifan Lokal	6 September 2025	Project Leader	Draf SOP dan Penyelenggara Kegiatann Pembagian Sembako sebelum memulai kegiatan proyek, dimulai dengan peletakan batu pertama (foto/video)

3.2 GAMBARAN PELAKSANAAN MILESTONE JANGKA PENDEK

1. Milestone Pertama

Tabel 6. Milestone Pertama

MILESTONE	KEGIATAN	WAKTU
1. Konsolidasi Tim Efektif dan persiapan pelaksanaan proyek perubahan	a. Pertemuan brainstorming ide proper dan branding name	19 Juli 2024
	b. Finalisasi RPP dengan penyesuaian milstone jangka pendek, menengah dan panjang	22 Juli 2024
	c. Pembuatan dan penandatanganan SKTim Efektif	22 Juli 2024

Persiapan pelaksanaan proyek perubahan APIK telah dimulai setelah on- campus meskipun SK Tim belum keluar. Pertemuan awal yang dilakukan sesuai Tabel 6 di atas ditujukan mulai dari brainstorming ide, branding name hingga melahirkan nama Sistem Informasi APIK pada tanggal 19 Juli 2024. Selanjutnya melakukan pembuatan draft SK Tim Efektif Pelaksana Proyek Perubahan, hingga penandatanganan oleh Kepala Dinas PUPR pada tanggal 22 Juli 2024. Tim Efektif ini dibagi menjadi dua kelompok atau Tim Kecil berdasarkan output yang ingin dicapai, yaitu: (i) Tim Kecil SI- APIK; (ii) Tim Kecil Penyusun Pedoman Kolaborasi Kearifan Lokal yang kemudian menjadi SOP.

Konsolidasi Tim Efektif mencakup: pertemuan pembahasan arahan dan saran dari Coach untuk selanjutnya menyusun rencana tindak lanjut; pertemuan persiapan acara yang melibatkan stakeholder S-APIK dan pertemuan penyusunan progress report dan laporan akhir.

2. Milestone Kedua

Tabel 7. Milestone Kedua

MILSTONE	KEGIATAN	WAKTU
1. Terwujudnya Persamaan Persepsi Stakeholder	a. Koordinasi dengan Stakeholder eksternal	23 Juli 2024
	b. Koordinasi dengan pihak Stakeholder internal	23 Juli 2024

Pelaksanaan pencapaian milestone kedua ini erat kaitannya dengan output SI-APIK. Petunjuk Teknis SOP SI APIK ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi pihak pemenang proyek dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Selain itu juga terdapat prosedur ujicoba yang perlu dilakukan untuk menjamin pihak ketiga agar nyaman dalam pengoperasian SI APIK.

3. Milestone Ketiga

Tabel 8. Milestone Ketiga

MILESTONE	KEGIATAN	WAKTU
1. Terbentuknya Tim Akselerasi dan Kolaborasi Kearifan Lokal	a. Rapat Dengan Dewan Adat Papua, Kepala Distrik, Kapolsek dan Danramil	19 Ags 2024
	b. Rapat Persiapan dengan tim efektif	22 Ags 2024
	c. Penerbitan SK Tim Akselerasi dan Kolaborasi Kearifan Lokal	24 Ags 2024

Pelaksanaan pencapaian milestone ketiga terkait dengan output draft Pedoman Umum Kolaborasi kearifan lokal daerah Kabupaten Teluk Wondama dilakukan dengan output draft final SOP Kearifan lokal sebelum sosialisasi dan penerapannya dilakukan dalam milestone pada jangka menengah sebagai percepatan pencapaian milestone jangka pendek sehingga dilakukan pada tanggal 5 September 2024 proyek pembangunan jalan rabat kampung Maryati Baru Rasiei Distrik Rasiei. Pedoman umum ini disusun mencakup beberapa hal utama yang dapat dikolaborasikan dengan kondisi dan budaya wilayah adat setempat dengan memanfaatkan SDM, asset atau fasilitas dan anggaran yang tersedia.

4. Milestone Keempat

Tabel 9. Milestone Keempat

MILESTONE	KEGIATAN	WAKTU
4. Pembentukan Komitmen Antar Stakeholder	a. Penandatanganan Pakta Integritas Komitmen Bersama Akselerasi Pembangunan Ifrastruktur	5 September 2024
	b. Membuat Uraian Tugas kerja untuk pedoman pelaksanaan masing-masing tim	6 September 2024

Pelaksanaan pencapaian milestone ke empat terkait dengan output draft SOP kearifan lokal percepatan pembangunan infrastruktur yang seharusnya di laksanakan pada milstone jangka menengah namun di percepat dilkaukan dengan pyoyek pertama pembangunan jalan rabat di Kampung Maryati baru dengan kontraktor pelaksana CV Wondiboy Jaya. Pelaksanaan milstone pada kegiatan ini tidak mendapatkan tantangan atau kesulitan, hanya saja proyek leader harus mengkomunikasikan terlebih dahulu dan sosialisasi sebelum dimulai kegiatan peletakan batu pertama di lakukan. Pembagian sembako, dan memberikan santuanan kepada pihak pemilik hak ulayat menjadi keharusan yang di atur dalam SOP sebelum dimulainya kegiatan. Berdasarkan hasil testimoni masyarkat menerima dan mengharapkan bisa dilakukan di setiap proyek pembangunan infrastruktur yang ada di kabupaten Teluk Wondama.

3.3 GAMBARAN PELAKSANAAN MILESTONE JANGKA MENENGAH (YANG DI PERCEPATAN)

Tabel 10. Milestone Percepatan Jangka Menengah

MILSTONE	KEGIATAN	WAKTU
1. Pembentukan Komitmen Antar Stakeholder	a. Penandatanganan Pagta Integritas dan Pembagian Sembako pada Pemilih Hak Ulayat saat peletakan batu pertama	5 September 2024
	c. Terbentuknya SOP Kolaborasi Kearifan Lokal	6 September 2024

Percepatan pencapaian milestone jangka menengah pada pelaksanaan proyek perubahan selama jangka pendek mencakup milestone untuk output: SI-APIK, sosialisasi Pedoman pelaksanaan Kolaborasi Kearifan Lokal sebelum memulai pekerjaan pembangunan infrastruktur di lapangan, di tanda dengan pembagian sembako dan peletakan batu pertama. Kersebut tidak lepas dari adanya peran penting project leader yang dijelaskan pada Tabel 10.

Tabel 11. Kegiatan peran project leader dalam percepatan pencapaian milestone secara kronologi dalam jangka pendek

NO	KEGIATAN	TANTANGAN/HAMBATAN	PERAN PROJECT LEADER	WAKTU
1	Peran project leader pada rencana kerja tim efektif	Mengubah mindset, serta menyamakan platform, komitmen dan target mewujudkan APIK di Setiap Proyek di Dinas PUPR	Menjelaskan logical frame work, merancang dan membagi tugas serta menetapkan target Rencana Kerja Tim Efektif	21 Jul 2024
2	Melakukan Diskusi dengan Dewan Adat Papua Kab Teluk Wondama	Mensinkronkan kebijakan Dewan Adat Papua dengan Kebijakan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan visi dan misi Bupati	Memberikan arahan esensi memperoleh kepastian kehadiran Ketua Dewan Adat Papua menyusun naska kolaborasi dan inovasi kearifan lokal	23 Jul 2024
3	Melakukan FGD Dengan Stakeholder Promotor	FGD merupakan ajang untuk mencari masukan pada saat penyusunan naskah SOP dan menyusun uraian tugas tim akselerasi kearifan lokal	Memberikan arahan, memimpin rapat, dan mengubah mainset tentang pentingnya kolaborasi kearifan lokal sebagai inofasi teerbaru untuk masyarakat adat	30 Juli 2024

4	Koordinasi dengan Stakeholder Eksternal	Menyampaikan pandangan terkait koraborasi kearifan lokal dalam kebijakan pembangunan infrastruktur di Sektor Pekerjaan Umum	Memberikan arahan dan dialogis untuk mencari formula penyusunan kebijakan koraborasi kearifan lokal	6 Agustus 2024
5	Koordinasi dengan Stakeholder Internal	Menyampaikan pandangan terkait pembangunan infrastruktur koraborasi dengan kearifan lokal	Memberikan arahan dan melakukan dialogis secara head to head untuk mencari formula penyusunan kebijakan koraborasi kearifan lokal	8 Agustus 2024
6	Melakukan Rapat Dengan DAP, Kepala Distrik, Kapolsek, Lurah	Memberikan arahan dalam rapat, menyampaikan gagasan terkait konsep kebijakan kolaborasi kearifan lokal	Menyampaikan gagasan dengan dialog tatap muka langsung kepada pihak terkait pendukung proyek perubahan	20 Agustus 2024
7	Melakukan Rapat dengan Tim Efektif	Memberikan arahan dalam rapat, menyampaikan gagasan terkait konsep kebijakan kolaborasi kearifan lokal	Menyampaikan gagasan dengan dialog tatap muka langsung kepada pihak terkait pendukung proyek perubahan	24 Juli 2024

8	Penerbitan SK Tim Kerja Akselerasi Pembangunan Infrastruktur	Menyampaikan ide dan gagasan terkait tim Akselerasi perlu di kukuhkan dengan SK sebagai panduan mereka untuk bekerja di lapangan	Membantu memberikan masukan dalam penerbitan SK tim akselerasi	2 September
9	Penandatanganan Pakta Integritas Komitmen Bersama Akselerasi Pembangunan Infrastruktur	Mengimplementasikan dan menjadikan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Kolaborasi kearifan lokal sebagai sebuah inovasi baru untuk masyarakat pemilik tanah adat.	Memberikan sambutan pada penandatanganan pakta integritas dan memberikan sembako serta santuan untuk masyarakat adat pemilik hak ulayat sebelum peletakan batu pertama	5 September 2024

10	Membuat JOB discription	Menyampaikan secara langsung urain tugas masing-masing anggota tim akselerasi pembangunan infrastruktur dengan keraifan lokal	Memberikan arahan tentang pentingnnya kerja sesuai tupoksi masing-masing anggota tim kerja akselerasi pembangunan infrastruktur dengan kolaborasi kearifan lokal	4 September 2024
11	Implementasi Proyek Perubahan yang diterapkan Pada Pembangunan Jalan Rabat Kampung Maryati Baru Rasiei	Mengubah minset masyarakat pada proyek pembangunan infrastruktur di tanah adat sebagai ajang mendapatkan penghasilan, sulitnya meyakinkan masyarkat pemilik tanah adat	Mempromosikan kebijakan kearifan lokal dan mensinergikannnya untuk percepatan pembangunan infrastruktur	5 September 2024
12	Pembentukan SOP Sebagai Kearifan Lokal	Beratnya menjalankan SOP kearifan lokal sebelum di sosialisasikan terlebih dahulu	Memberikan arahan pada tim dan persiapan penerapan SOP kearifan lokal	6 September 2024

3.4 PERNYATAAN DUKUNGAN STAKE HOLDER

DADIM 1811 PERADABAN TELUK WONDAMA



Gambar 1. DADIM 1811 Letkol Budi Setiadi SIP

Saya selaku DANDIM 1811 Teluk Wondama sangat mendukung untuk proyek perubahan ini, di mana akselerasi pembangunan infrastruktur yang berkolaborasi dengan kearifan lokal bisa mendukung percepatan pembangunan di wilayah Teluk Wondama dan Papua Barat pada umumnya.

KAPOLRES TELUK WONDAMA



Gambar 2. KAPOLRES AKBP Hari Susanto

Di tempat kita itu selalu melibatkan kita kepolisian, kemudian dengan Dewan Adat. Karena kita tahu masalah di Wondama ini kan khususnya di Papua ini kan masalah adat, ganti rugi segala macam, apabila ada, jadi kita punya mendukung sekali kalau ada pembangunan yang melibatkan di bagian itu, khususnya rakyat.

KAPOLSEK WASIOR



Gambar 3. KAPOLSEK AIPTU. M.S. Atmaja, SH

Kolaborasi dengan kearifan lokal, tentunya kita juga sering berkomunikasi juga dengan Dewan Adat bahwa, sehingga dari kebersamaan kami, menginginkan sesuai dengan harapan pembangunan yang dibutuhkan di kearifan lokal tersebut.

KEPALA DINAS SOSIAL TELUK WONDAMA



Gambar 4. Kepala Dinas Sosial. Musa Sapari, S.Sos

Saya sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama sangat mendukung proyek perubahan yang dilakukan oleh bapak dengan judul Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Dengan Kolaborasi Kearifan Lokal .

KEPALA DISTRIK WASIOR



Gambar 5. Kepala Distrik Wasior. M. Ikbal Marani, SIP

Saya ingin mengucapkan bahwa saya sebagai Kepala Distrik Wasior mendukung Proyek Perubahan Akselerasi Pembangunan Infrastruktur, Kolaborasi Kearifan Lokal. Kerjasama dan kelibatan semua pihak terkait untuk kelancaran dan kemajuan daerah di wilayah kami perlu dilakukan kolaborasi dan komunikasi duduk bersama dalam tikar adat. Dalam tiga tungku, saya yakin semua bisa berjalan dengan

lancar. Sukses untuk Pak Kadin PU yang selalu aktif di mana tengah masyarakat dalam mengerjakan suatu masalah yang hadir. Sukses.

KEPALA KAMPUNG MORU



Gambar 6. Kepala Kampung Moru. Piter Imburi

Saya sebagai Kepala Kampung Moru Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama. Mendukung proyek perubahan ini, akselerasi pembangunan infrastruktur, kolaborasi kearifan lokal agar tidak terjadi kegiatan pemalangan, pembangunan berupa pemalangan, dan lain-lain. Demikian sukses PUPR.

DEWAN ADAT PAPUA DAERAH WONDAMA



Gambar 7. Adrian Worengga. Ketua Dewan Adat

Selamat siang, saya Adrian Worengga selaku Ketua Umum Dewan Adat Wilayah Wondama sangat mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Teluk Wondama terkait juga atau berdasarkan peraturan presiden tentang percepatan Pembangunan.

PEMILIK ULAYAT (MEWAKILI) DAUD SUABEY



Gambar 8. Daud Suabey salah satu pemilik Hak ulayat di Teluk Wondama

Nama saya Daud Suabey tinggal di Kelurahan Wasior. Pribadi saya selalu siap mendukung tidak ada seperti menghalangi dan sebagainya.

DPRK TELUK WONDAMA



Gambar 9. Remran Sinadia, SE. Ketua Komisi C. DPRK Teluk Wondama

Saya Remran Siandia, Ketua Komisi C DPRK Teluk Wondama Papua Barat.

Beberapa langkah strategi yang bisa dilakukan antara lain;

1. Menata ulang rencana tata ruang wilayah atau RTRW;
2. Kita menggandeng badan pertanahan untuk melakukan sertifikasi seluruh tanah yang telah dilakukan pembebasan;

3. Karakteristik Wilayah Distrik Wasior, Wondiboy dan Rasiey umumnya memiliki dataran yang sempit dan pendek.
4. Mengingat Kabupaten Teluk Wondama adalah daerah konservasi, maka konsep pembangunan wajib memperhatikan daya dukung lingkungan.
5. Teluk Wondama juga merupakan daerah dengan indeks bencana tinggi, terutama banjir dan longsor serta gempa bumi.
6. Untuk memperkuat itu semua, pemerintah daerah dalam hal ini, Pak Bupati dan DPRD dengan menggandeng Lembaga Adat, perlu merumuskan regulasi berupa peraturan daerah untuk menjadi payung hukum.
7. Dalam rangka itu, maka posisi lembaga adat perlu diperkuat dari sisi struktur maupun sumber daya manusia.

Demikian beberapa hal yang boleh kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam rangka menyelesaikan masalah pertanahan dan melancarkan pembangunan di Kabupaten Teluk Wondama.

3.5 TESTIMONI PENERIMA BANTUAN LANGSUNG

Untuk mengukur keberhasilan dari sebuah kegiatan dari setiap tahapan yang ada di dalam pelaksanaan aksi proyek perubahan akselerasi pembangunan infrastruktur dengan kolaborasi kearifan lokal maka perlu dilakukan pengambilan data wawancara langsung sebagai testimoni dari pihak penerima manfaat kegiatan pembangunan jalan rabat di kampung Maryati Baru Raseii adalah sebagaimana hasil wawancara dua orang berbeda penerima manfaat kebijakan kolaborasi kearifan lokal sebagai berikut :



Gambar 10. Mama-mama Penerima Bantuan Sembako I (Mama Mince)

Paling senang. Pokoknya yang di sini ada yang senang dan tidak senang juga tidak apa-apa.

Jalan itu untuk pemekaran kampung baru ini. Dorang tidak mau bapak bicara untuk pemekaran kampung baru. Tapi bapak sendiri bilang tahun ganti tahun, kepala kampung ganti kepala kampung, pokoknya bantuan apa pun kami tidak pernah diperbantukan. Artinya bapak sendiri kerjakan harus kita mandiri sendiri.

Harapan ke depan mungkin sama dengan kepala kampung yang dulu lebih baik.



Gambar 11. Mama-mama Penerima Bantuan Sembako II (Mama Ani)

Minta terima kasih kepada Bapak Bupati Teluk Wondama berserta rombongan, karena jalan ini bisa baik untuk masyarakat pakai. Jadi kita kedepan rasa baik.

Harapan ke depan untuk kampung ini lebih baik lagi supaya jalan ini baik biar masyarakat pakai.

BAB IV

MARKETING SEKTOR PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI

Dalam implementasi proyek perubahan ini dilakukan serangkaian marketing sektor publik serta strategi komunikasi dengan stakeholder. Dengan demikian proyek perubahan ini menghasilkan akselerasi kolaborasi riset pertanian di Badan Litbang Pertanian yang didukung oleh stakeholder yang memiliki tingkat ketertarikan dan tingkat pengaruh yang semakin tinggi.

4.1 PEMETAAN STAKEHOLDERS DAN PENGARUHNYA

Stakeholders yang terlibat dan mempunyai peran dan pengaruh terhadap proyekperubahan adalah sebagai berikut :

1. Stakeholder Utama

Stakeholder utama merupakan pihak internal dan eksternal yang mempunyai komitmen sepenuhnya akan mendukung kegiatan proyek perubahan yaitu:

- a. Sekretaris Daerah
- b. Kapolres
- c. Dandim
- d. Ketua Komisi C DPRK
- e. Kepala Distrik
- f. Kepala Kampung
- g. Dewan Adat Papua

2. Stakeholder Pendukung

Stakeholder pendukung merupakan pihak internal maupun eksternal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama yang mendukung kegiatan proyek perubahan yaitu:

- a. Kepala Dinas Sosial
- b. Kepala Dinas Pertanian
- c. Kepala Dinas LHK
- d. Sekretaris Dinas PUPR
- e. Kepala Bidang Binamarga
- f. Kepala Bidang Perumahan
- g. Kepala Bidang Cipta Karya
- h. Kepala Bidang SDA
- i. Kepala Bidang Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan

Berdasarkan analisis stakeholder baik stakeholder utama maupun pendukung dalam pelaksanaan proyek perubahan ini adalah sebagai berikut:

1. Kelompok *promoters (High influence/high interest Stakeholder)*, yaitu kelompok/stakeholder yang memiliki kepentingan besar terhadap program proyek perubahan dan juga kekuatan untuk membantu keberhasilan proyek perubahan atau sebaliknya menggagalkan proyek perubahan, yaitu:
 - a. Sekda
 - b. Ketua LMA/DAP
 - c. Kapolres
 - d. Dandim
 - e. Ketua Komisi C
 - f. Kepala Distrik
 - g. Kepala Kampung
2. Kelompok *latens (High influence /low interest Stakeholder)*, yaitu kelompok/Stakeholder yang tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam kegiatan tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program proyek perubahan jika tertarik, yaitu:
 - a. Pemilik Hak Ulayat
 - b. Kepala Dinas LHK
 - c. Kepala Dinas Sosial
3. Kelompok *defenders (Low influence/high interest Stakeholder)*, yaitu kelompok/stakeholder yang memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi kegiatan proyek perubahan, yaitu:
 - a. Kepala Bappeda/BP4D
 - b. Kabag Hukum
 - c. Kabag Pemerintahan

4. Kelompok apathetics (*Low influence/low interest Stakeholder*), yaitu kelompok/stakeholder yang kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan dalam proyek perubahan bahkan bisa juga tidak mengetahui adanya kegiatan proyek Perubahan, antara lain:
 - a. Kepala Balai Taman Nasiona Teluk Cenderwasih
 - b. Kepala Badan Pertanahan

1.8 LATENT (+ -)

High influence, low interest

Tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam PP tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi PP jika mereka menjadi tertarik

- Kepala Dinas KLHK
- Pemilik Hak Ulayat
- Kepala Dinas Sosial

1.9 PROMOTORS (+ +)

High influence, high interest

Memiliki kepentingan besar terhadap PP dan jika kekuatan membantu membuatnya berhasil

- Sekretaris Daerah
- Ketua LMA/DAP
- Kapolres
- Dandim 1811
- Ketua Komisi C
- Kepala Distrik
- Kepala Kampung

1.10

PHATETICS (- -)

Low influensce, low interest

Kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya PP

- Kepala Balai Taman Nasional TC
- Kepala Badan Pertanahan

1.11

EFENDERS (- +)

Low influence, high interest

Memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi PP

- Kepala Bapeda/BP4D
- Kabag Hukum
- Kabag Pemerintahan

Gambar 12. Peran Stakeholder sebelum implementasi PP

4.2 STRATEGI MARKETING

Bentuk strategi marketing dalam proyek perubahan ini adalah strategi *Marketing Mix 4P1C (Product, Price, Place, Promotion dan Customer)*.

Tabel 12. Strategi Manajemen Sektor Publik

<i>Product</i>	Pakta integritas Komitmen bersama team akselerasi dan kolaborasi dan SOP
<i>Price</i>	Anggaran, berasal dari team akselerasi dan kolaborasi, partisipasi pihak 3 atau relerasi
<i>Place</i>	Gedung LMA, Kantor Kep Distrik, Kantor Polsek
<i>Promotion</i>	Mempromosikan <i>Branding Akselerasi Pembanguana infrastruktur dengan kolaborasi kearifan lokal melalui FGD, media sosial, workshop, publikasi, iklan dan Sukses story</i>
<i>Customer</i>	Pemilik hak ulayat, pihak 3 dan mahasiswa

Tabel 13. Strategi Komunikasi

NO	STAKEHOLDER	STRATEGI KOMUNIKASI
1.	Sekretaris Daerah	Konsultasi
2.	Kapolres dan Dandim	Koordinasi, <i>project leader</i>
3.	Kepala Distrik, Kepala Kampung	Koordinasi
4.	Dewan Adat Papua	Koordinasi dan Sosialisasi
5	Pemilik Hak Ulayat	Sosialisasi dan Pemberian Sembako/Santunan

Pada proyek perubahan APIK ini telah dilaksanakan beberapa strategi marketing agar pemetaan stakeholders bisa bergerak ke atas dan semua stakeholder dapat menjadi promotor antara lain dengan sosialisasi, koordinasi dan Focus Group Discussion. Beberapa stakeholders yang bergeser menjadi promotor antara lain: Sekretaris Daerah, Dewan Adat Papua, Kapolres, Dandim, Kepala Distrik, Kepala Kampung dan Komisi C. Bukti-bukti kegiatan disajikan pada Lampiran .

4.3 STRATEGI MENGATASI KENDALA

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala diantaranya :

- a. Komunikasi efektif kepada *stakeholder* pendukung pentingnya pelaksanaan Proyek Perubahan bagi keberlanjutan pembangunan infrastruktur kolaborasi kearifan lokal
- b. Peran *Project leader* membagi habis milestone kedalam kelompok kerja sesuai output utama pelaksanaan proyek perubahan yaitu tim efektif yang bekerja untuk Penyusunan naskah kebijakan yang dituangkan secara tertulis yang menjadi SOP kearifan lokal pembangunan infrastruktur di Sektor Pekerjaan Umum. Selain itu peran Project Leader dalam menyelesaikan berbagai kendala dan tantangan pada kegiatan penting pencapaian milestone sangat berpengaruh signifikan terhadap hasil yang dicapai.
- c. Komunikasi efektif dengan Kelompok Kerja Pelaksanaan Proyek Perubahan dan menyusun prioritas kegiatan serta monitoring agar output milestones tercapai sesuai jadwal palang.
- d. Memanfaatkan waktu se efektif mungkin dan pelaksanaan sosialisasi APIK seoptimal mungkin kepada pihak pemenang proyek.

4.4 PERAN *PROJECT LEADER* DALAM MARKETING SEKTOR PUBLIK

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) merupakan Organisasi prangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan pembangunan infrastruktur di Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama sehingga mengakselerasi pembangunan imfrastruktur dengan kolaborasi kearifan lokal perlu dilakukan agar hambatan dan tangtangan penolkan kegitan pembangunan di lapangan dapat diselesaikan. Disis lain DPUPR dituntut berperan dan bersinergi dalam kerangka kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya baik di tingkta daerah kaupaten maupun di tingkat provinsi dan pemerintah pusat. *Project leader* pada marketing sector publik dan pemberdayaan organisasi memegang peran kunci.

Peran yang dilakukan oleh *project leader* dalam melaksanakan marketing sektor publik antara lain:

1. Memetakan stakeholder terkait kepentingan dan pengaruhnya untuk diarahkan terjadinya pergeseran peran stakeholder menuju promotor.
2. Menyusun dan mengkoordinasikan implementasi strategi marketing dan komunikasi.

3. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta mencari solusi berdasarkan umpan balik dari marketing sektor publik proyek perubahan.

4.5 SOLUSI

Mengusulkan kebijakan, pedoman umum, dan naskah akademik untuk mengakselerasikan pembangunan dan kolaborasi dengan kearifan lokal membangun sistem APIK yang dapat berkolaborasi dengan lembaga lainnya dengan memadukan secara terintegrasi akan meningkatkan potensi kolaborasi.

Kolaborasi merupakan konsep relasi antara organisasi, aliansi strategis dan jejaring kerja (*networks*) multi organisasi. Kolaborasi membahas kerja sama dua pihak atau lebih untuk mengelola sumber daya yang sama, yang sulit dicapai bila dilakukan secara individual. Strategi kolaborasi merupakan hal yang dilakukan oleh satu organisasi dengan organisasi lainnya dalam membangun atau memperbaiki keadaan organisasinya untuk mencapai manfaat/keuntungan dan tujuan tertentu bagi para pihak yang berkolaborasi.

Saat ini kolaborasi dan inovasi interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin menjadi tren kolaborasi terkini dan garda terdepan untuk penciptaan solusi-solusi atas permasalahan di berbagai sektor, termasuk sektor pekerjaan umum. Menurut keterlibatan aktornya, kolaborasi mengarah pada pengembangan model pentahelix, yaitu kerja sama yang melibatkan lima unsur, yaitu 1) akademisi, 2) bisnis/pelaku usaha, 3) pemerintah, 4) masyarakat, dan 5) media. Akademisi pada model Pentahelix berperan sebagai konseptor. Bisnis/pelaku usaha berperan sebagai *enabler* yang menghadirkan infrastruktur. Bisnis juga merupakan entitas yang melakukan proses bisnis dalam menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Komunitas berperan sebagai akselerator yang bertindak sebagai perantara atau menjadi penghubung antar pemangku kepentingan untuk membantu memudahkan tujuan dan rencana bersama. Pemerintah terutama berperan sebagai regulator sekaligus kontroler yang memiliki peraturan dan tanggung jawab. Media berperan sebagai expander. Media berperan dalam mendukung publikasi dalam promosi dan membuat *brand image* dalam sebuah program dan melalui website atau media lainnya sebagai media untuk promosi dan informasi.

Berdasarkan telaah di atas akselerasi dan kolaborasi kearifan lokal pada proses pembangunan infrastruktur sudah saatnya diarahkan pada model interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin melalui penerapan konsep pentahelix.

4.6 STRATEGI PENGEMBANGAN SDM

Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam team akselerasi pembangunan Infrastruktur dengan kolaborasi kearifan lokal maka perlu dilakukan berbagai macam kegiatan dan terobosan antara lain sebagai berikut :

NO	PIHAK TERKAIT	PERUBAHAN KOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN	CARA PENGEMBANGAN KOMPETENSI
1	Lembaga <u>Masyarakat Adat</u>	<u>Meningkatkan Pengetahuan tentang hak-hak adat dalam kepemilikan tanah</u>	<u>Melalui Bimtek</u>
2	<u>Aparat Kampung/Kelurahan</u>	Ketrampilan melakukan negoisasi dan pemberian pencerahan	Melalui bimtek
3	<u>Distrik</u>	<u>Meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan mediasi</u>	<u>Melalui Bimtek</u>
4	<u>Polsek, Koramil</u>	<u>Mengetahui bats-batas wilayah hukum dan pelanggaran hukum</u>	Sosialisasi

Tabel 14. Kegiatan Pengembangan SDM

Sedangkan untuk mengembangkan potensi diri dari setiap SDM yang ada di team APIK dilakukan strategi pengembangan dirinya sebagai berikut :



Adapun materi tambahan diklat bagi team APIK ada sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
2. Pentingnya Membangun Indonesia Dari Desa
3. Manajemen Komunikasi

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Pembangunan Infrastruktur di daerah sering kali mengalami hambatan non teknis di lapangan seperti pemalangan atau penolakan masyarakat pemilik hak ulayat atas proyek pembangunan infrastruktur yang berada di lokasi tanah adat yang menyebabkan lambatnya perkembangan dan pertumbuhan sebuah daerah, lebih khusus di daerah Papua yang masalahnya makin komplek karena berkaitan dengan adat dan istiadat daerah setempat. Lemahnya aspek pengelolaan kolaborasi kearifan lokal daerah setempat untuk bersinergi dalam pembangunan infrastruktur di Bidang Pekerjaan Umum menjadi tantangan dalam akselerasi pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu proyek perubahan ini diimplementasikan dalam kerangka mengintegrasikan dan mengkolaborasikan kearifan lokal daerah setempat dengan melibatkan berbagai stakeholder agar percepatan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan menjadi sesuatu yang bisa di andalkan untuk kemajuan dan pertumbuhan daerah yang jauh dari aksesibilitas, menurunkan resistensi masyarakat dengan Gerakan pemalangan atau menghalangi pembangunan serta menghilangkan mindset masyarakat tentang proyek, sebagai sumber mencari keuangan pribadi tanpa memikirkan resiko.

Marketing sektor publik dan pemberdayaan organisasi telah dilaksanakan sebagai strategi mempercepat pelaksanaan proyek perubahan, berhasil mengakselerasi peran stakeholder menjadi promotor. Bukti-bukti keberhasilan tersebut ditunjukkan dengan beberapa penandatanganan Pakta Integritas Komitmen Kerjasama, Peletakan Batu Pertama, Pembagian Sembakau dan Pemberian Santuan Bagi Masyarakat Adat Pemilik Hak Ulayat.

5.2 REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi sebagai hasil dari pelaksanaan proyek perubahan ini adalah sebagai berikut:

1. Komitmen yang kuat dari level pengambil kebijakan dan Tim Efektif untuk meneruskan pelaksanaan dan implementasi proyek perubahan sesuai tahapan rencana strategis jangka menengah dan jangka Panjang.

2. Guidance berupa Petunjuk-petunjuk Teknis dari regulasi yang digagas dalam proyek perubahan ini sangat diperlukan, untuk akselerasi kolaborasi kearifan lokal dan inovasi di sektor Pekerjaan Umum
3. Kebijakan afirmatif dari pengambil keputusan yang sesuai (compliance) diperlukan untuk mendukung akselerasi kolaborasi kearifan lokal dan inovasi di sektor Pekerjaan Umum.

5.3 LESSON LEARNT

Pembelajaran atau lesson learned yang diperoleh *project leader* selama menjalankan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dan dalam pelaksanaan proyek perubahan antara lain:

1. Menumbuhkan kompetensi *leadership* dalam melakukan perubahan strategis di Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama terutama yang terkait dengan Pembangunan Infrastruktur di Sektor Pekerjaan Umum, kemampuan membangun sinergi, “team work”, menjadi motor penggerak perubahan, serta menciptakan karakter yang terbuka dalam akselerasi kolaborasi kearifan lokal dan inovasi di sektor Pekerjaan Umum
2. Peranan Kepemimpinan sangat penting dalam pengelolaan sebuah organisasi, Dibutuhkan pemimpin yang berintegritas dan *agile* pada lingkungan organisasi yang terus berubah (*learning organization*). Bisa belajar cepat dari berbagai peristiwa sehingga mampu berkolaborasi dan berinovasi untuk terus dilakukan sampai terjadi perubahan
3. Memahami dan menerapkan ciri kepemimpinan kewirausahaan sebagai bagian dari kepemimpinan strategis. Melalui proyek perubahan ini,
4. Menumbuhkan kemampuan bekerja dengan visi, cermat memanfaatkan peluang, kemampuan membangun tim, fokus melayani pelanggan, berani mengambil risiko, inovatif dan merumuskan strategi dan eksekusi.
5. Menumbuhkan semangat menerapkan organisasi yang terus belajar guna menciptakan kinerja layanan publik yang adaptif, *agile*, *entrepreneurship*, cepat serta dipercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra Azumardi, Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia. Yogyakarta. Kanisius. 2007
- _____. *Menjaga Indonesia*. Jakarta. Kencana. 2020
- Haeli, Integritas, Modul Pelatihan Kepemimpinan BKPSDM NTB. 2019
- Integritas Kepemimpinan, Modul Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II, Lembaga Administrasi Negara. 2021.
- Haeli, Integritas, Modul Pelatihan Kepemimpinan BKPSDM NTB. 2019
- Hasibuan, S., Ikatrinasari, Z. F., & Hasbullah. (2020). Desain Sistem Manajemen Kinerja: Kasus Industri Manufaktur dan Jasa. Ahlimedia Book.
- Kepemimpinan Digital, Modul Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II, Lembaga Administrasi Negara. 2021.
- Kepemimpinan Wirausahaan, Modul Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II, Lembaga Administrasi Negara. 2021.
- Madjid, Noor Cholis, Achmat Subekan, dan Widhayat Rudy Windarta, *Modul Manajemen Keuangan Negara*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2021).
- Manajemen Startegis Sektor Publik, Modul Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II, Lembaga Administrasi Negara. 2021.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Tahapan I
https://drive.google.com/drive/folders/1ZHLCKrrge0tI09L73qstZdgEGe_gUgBu?usp=sharing
2. Lampiran 2. Tahapan II
https://drive.google.com/drive/folders/1UiIJ2blxKbe74x_Gy2ypGqDTfsP3e_3?usp=sharing
3. Lampiran 3. Tahapan III
<https://drive.google.com/drive/folders/1ARwAm1Y5dz2-JXHD4zvFvuWQFlk37PnT?usp=sharing>
4. Lampiran 4. Tahapan IV
https://drive.google.com/drive/folders/1vJMJU7X_UYTsCJ_cFQsyJpNhWgc9t43O?usp=drive_link
5. Lampiran 5. Tahapan V
https://drive.google.com/drive/folders/1cbuxZgwnPc56U6N7OEIhBCIQJ0PbCC69?usp=drive_link
6. Lampiran 6. Tahapan VI
https://drive.google.com/drive/folders/1j8tHX6fIsv1uKfkjQQRh64GZb7JJpN02?usp=drive_link
7. Lampiran 7. Tahapan VII
https://drive.google.com/drive/folders/1NyZSOR49y5_GKmV0uYvV04h_BWyk66UD?usp=drive_link
8. Lampiran 8. Tahapan VIII
https://drive.google.com/drive/folders/1esE-sltgTLBDnox_NIfXQFCOCzxuIHU?usp=drive_link
9. Lampiran 9. Tahapan IX
https://drive.google.com/drive/folders/1HAXiWMVY1HetZAn4RZ25zg2Z6uXqDBx3?usp=drive_link
10. Lampiran 10. Tahapan X
https://drive.google.com/drive/folders/1vO2Gpil6hc5VgXqMiiW_q2MXfMSCBrOz?usp=drive_link
11. Lampiran 11. Tahapan XI
https://drive.google.com/drive/folders/1SQZ-YwGQLCRly0CORxXAlerSs7uPHkxQ?usp=drive_link

**LAMPIRAN
PAGTA INTEGRITAS**

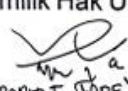
PAKTA INTEGRITAS

**KOMITMEN BERSAMA
PEMBANGUNAN JALAN RABAT KAMPUNG RASIEI DISTRIK RASIEI
KABUPATEN TELUK WONDAMA**

Kami Yang Bertanda Tangan di bawah ini adalah Stakeholder Yang Berkomitmen Bersama Untuk Kelancaran Pembangunan Jalan Rabat Kampung Rasiei Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama Sebagai Perwujudan Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Dengan Kolaborasi Kearifan Lokal.

Rasiei, 5 September 2024

 Bupati <u>Ir. H. S. Mambocan</u>	 Sekretaris Daerah (<u>Asen warap</u>)	 Kapolres (<u>Har Subroto</u>)	 Dandim 1811 (<u>BUDI SETADI</u>)	 Kepala Dinas PUPR (<u>Sahar Fudhri</u>)
--	--	--	--	--

 Ketua DAP (<u>ADRIAN R. NEMAN</u>)	 Ketua Komisi C (<u>M. FENOSIRUK</u>)	 Kepala Distrik Rasiei (<u>WILLY D. MARINI</u>)	 Kepala Kampung Maryati (<u>RIWUS K. TOREY</u>)	 Pemilik Hak Ulayat (<u>ROBERT J. TOREY</u>)
--	--	--	---	---

LAMPIRAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SOP : Pencegahan Konflik Masyarakat dengan Proyek Pembangunan Infrastruktur

No.	Tahapan	PELAKSANA				Dewan Adat	Keluarga Adat	MUTU BAKU			Keterangan
		Kepala Dinas PUPR/ Pengguna Anggaran (PA)	Penyedia Jasa	PPK / Kepala Bidang	Tim PPK (PPTK / Direksi / Konsultan Pengawas)			Kelengkapan	Waktu	Luaran (Output)	
1	Mulai (Penetapan Pemenang Tender)							Kontrak Kegiatan Pembangunan Infrastruktur			Penyedia setelah penandatanganan kontrak berkoordinasi mengenai lokasi yang akan dibangun
2	Pemetaan potensi konflik terhadap lokasi pembangunan infrastruktur								30 Menit	Peta Lokasi Pembangunan	
3	Pelaksana Pembangunan Infrastruktur melakukan koordinasi dengan pihak Dewan Adat							Dokumen kontrak terkait dengan pembangunan infrastruktur dan lokasi	1 Hari	PPK dan Tim:	
4	Penetapan Ruang Lingkup Wilayah Adat terhadap proyek pembangunan infrastruktur									1 -> Surat Rekomendasi dari Dewan Adat untuk Ketua Adat setempat (lokasi pembangunan)	
5	Pelaksana menyiapkan bahan kontak (Uang Rp200.000,-, Bahan Makanan dan Pinang Sirih)						Tidak	Bahan Kontak : 1. Uang Rp2.000.000,-; 2. Pinang dan Sirih; 3. Bahan Makanan	3 Hari		2-> Dewan Adat melakukan mediasi dengan keluarga pemilik ulayat
6	Pendekatan kepada keluarga yang terkena dampak dengan membawa bahan kontak									Foto Dokumentasi	- Apabila tidak ada kesepakatan antara maka proses dikembalikan kepada Dewan Adat
7	Melakukan sosialisasi pembangunan infrastruktur kepada pihak masyarakat adat yang terkena dampak bersama ketua adat setempat, kepala distrik, kepala kampung/lurah						Ya		1 Hari	Foto Dokumentasi	
8	Penandatanganan Pakta Integritas dengan seluruh stakeholders yang berkepentingan							Berita Acara Pakta Integritas	1 Hari	Bukti Pembayaran	
9	Penyerahan simbolis hasil kesepakatan							1. Berita Acara Pakta Integritas 2. Dokumentasi 3. Penyerahan Bahan Makanan/ Pembayaran ulayat hasil kesepakatan	1 Hari		
10	Selesai										

 PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	NOMOR SOP TANGGAL PEMUATAN TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH	SOP/PEHU/PLH/2022 25 September 2024 25 September 2024 
	NAMA SOP	Pencegahan Konflik Masyarakat dengan Pembangunan Infrastruktur
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121) 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Karistikal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286) 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) 8. Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah	Kualifikasi Pelaksana	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
Peringatan - Apabila SOP tidak dilakukan, maka pelaksanaan kegiatan tidak berjalan efektif dan efisien	Pencatatan dan Pelaporan - Arap Laporan Kegiatan Pelaksanaan dan Evaluasi	

DOKUMENTASI PENGEMBANGAN SDM TIM EFEKTIV

